

GAGASAN POLITIK HASAN MUHAMMAD DI TIRO TENTANG NASIONALISME ACEH

Fadhil Ilhamsyah

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
email: fadhil.ilhamsyah@utu.ac.id

Abstract

This article aims at elaborating the idea of Hasan Muhammad Di Tiro about nationalism in Aceh who become the ideology of the free Aceh Movement (GAM). The thought of nationalism is Hasan Muhammad di Tiro Aceh is a reflection of disappointment against the attitude of the Government of Indonesia in the injustice of natural resource management. The thought of nationalism in Aceh is very in influence by the history of the triumph of the Kingdom of Aceh in the past that then grow awareness of Hasan Muhammad di Tiro formed to fight the National Liberation Front Aceh-Sumatra. Present day Aceh cannot manifest directly thought of nationalism is Hasan Muhammad di Tiro Aceh that is becoming an independent nation. However indirectly, a sense of nationalism that Aceh has grown and continues to persist in the soul of the Acehnese by keeping the peace as well as the meimplementasikan details of the Helsinki Agreement for the creation of prosperity and well-being for the people Aceh as on aspire by Tengku Hasan Muhammad di Tiro.

Keywords: *Idea, Nationalism, Aceh*

PENDAHULUAN

Hasan Muhammad Di Tiro lahir di Pidie, Aceh, pada 25 September 1925 tepatnya di Kampung Tanjong Bungong Lameulo, sekitar 20 km dari Sigli. Hasan Muhammad di Tiro adalah keturunan ketiga dari Tengku Syik Muhammad Saman di Tiro. Hasan Muhammad Di Tiro merupakan anak kedua pasangan Tengku Pocut Fatimah dan Tengku Muhammad Hasan. Tengku Pocut inilah cucu perempuan Tengku Muhammad Saman di Tiro. Karena posisinya sebagai keturunan Tengku Saman di Tiro itulah Hasan Muhammad di Tiro dihormati oleh seluruh masyarakat Aceh.

Hasan Muhammad Di Tiro merupakan deklarator Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 4 Desember 1976 di kawasan gunung Halimon Pidie. Hasan Muhammad di Tiro ikut keluar-masuk hutan bersama pasukannya sejak 1976 untuk memperjuangkan pemisahan Aceh dari Indonesia. Perjuangannya secara gerilya dalam belantara hutan Aceh itu hanya berlangsung tiga tahun. Sejak mendeklarasikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), pengakuan orang Aceh terhadap Hasan Muhammad Di Tiro bukan hanya karena perjuangannya. Dalam tubuhnya mengalir darah biru para pejuang Aceh.

Sikap keras Hasan Muhammad Di Tiro dalam menolak konsep Negara Kesatuan Indonesia merupakan proses pergolakan bathin yang berlangsung lama, sebelum berangkat ke Amerika pada 1950, Hasan Muhammad di Tiro merupakan pemuda yang terlibat aktif dalam berbagai organisasi keIndonesiaan. Bersama abangnya, Zainul Abidin Di Tiro, Hasan Muhammad di Tiro aktif dalam Pemuda Republik Indonesia (PRI). Hasan Muhammad Di Tiro bahkan pernah menjabat Ketua Muda PRI di Pidie pada 1945. Ketika Wakil Perdana Menteri II dijabat Syafruddin Prawiranegara, Hasan Muhammad Di Tiro pernah menjadi stafnya. Atas jasa Syafruddin jugalah melalui rekomendasi Tengku Daud Beureueh, Hasan Muhammad Di Tiro kuliah pada Fakultas hukum Unuversitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan kemudian mendapat beasiswa *Colombo Plan* ke Amerika. Sembari menyelesaikan studinya di negeri Amerika Serikat, Hasan Muhammad Di Tiro juga bekerja pada Kedutaan Indonesia. Artinya, pada suatu periode Hasan Muhammad Di Tiro pernah menaruh harapan besar terhadap Indonesia.

Pada Januari 1965, Hasan Muhammad Di Tiro menggagaskan ide Negara Aceh Sumatra Merdeka. Menurut Isa Sulaiman (2000 : 12) dalam bukunya *Aceh Merdeka; Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan*, apa yang dilakukannya dengan memproklamasikan Negara Aceh Merdeka pada 4 Desember 1976 merupakan akumulasi dari kekecewaan Hasan Tiro mengenai Indonesia dan manipulasi terhadap sejarah perjuangan Aceh yang kemudian melahirkan ide yang sudah disosialisasikannya sejak tahun 1965. Ide mengenai Negara Aceh Sumatra diambil Hasan Muhammad Di Tiro dari berdasarkan sejarah wilayah Kesultanan Iskandar Muda. Pada masa jayanya kerajaan Aceh memang pernah sampai menguasai Lampung, Bengkulu, dan sebagian wilayah Malaysia.

Tujuan perjuangan Hasan Tiro untuk mewujudkan negara bersambung (*successor state*) dari kerajaan Aceh tempo dulu sebagai satu Kerajaan yang pernah ada dalam catatan sejarah negara-negara di dunia. Menurut seorang pengarang berkebangsaan Belanda yang bernama Boland, karena Aceh masih sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat dan tidak pernah menyerahkan kedaulatannya pada Belanda, maka Belanda tidak menginvasi Aceh melalui agresi militenya baik yang pertama maupun yang kedua pada 1947-1948. Akan tetapi pada 27 Desember 1949 ketika Belanda menandatangani suatu perjanjian pemindahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, Republik Indonesia Serikat mengklaim bahwa semua daerah jajahan di Hindia Belanda di Nusantara menjadi daerah kekuasaan RIS, termasuk kerajaan Aceh di dalamnya, walaupun pada dasarnya Aceh tidak pernah ditaklukkan oleh Belanda.

Perjanjian antara Belanda dan daerah jajahan inilah yang menjadi alat pemindahan kekuasaan Belanda kepada RIS, dan menjadi sumber kekuasaan RIS atas dunia melayu.

Menurut Hasan Muhammad di Tiro, pemindahan kuasa Belanda atas Indonesia bertentangan dengan prinsip dekolonisasi sebuah negara, sebagaimana telah diatur dalam beberapa resolusi PBB, yaitu Resolusi PBB No. 1514 – XV, 2625 – XXV, 2621 – XXV dan beberapa konvensi PBB. Oleh karena Belanda sebagai penjajah tidak mempunyai hak hukum atas tanah yang dirampas, maka Indonesia pun tidak mempunyai hak legalitas hukum apapun atas kepulauan melayu yang masing-masing adalah milik rakyatnya, termasuk Aceh (Munawar A Djalil, 2009 : 40). Menurut Hasan Muhammad di Tiro, realita ini merupakan fakta sejarah yang tidak boleh dinafikan. Ini adalah perkara sebuah negara bangsa yang hingga kini masih diakui oleh hukum internasional sebagai sebuah negara berdaulat. Kenyataan inilah yang mendorong kemunculan pemikiran politik Hasan Muhammad di Tiro untuk mendeklarasikan kembali kedaulatan Aceh yang didasari pada hukum internasional. Artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang nasionalisme ke-Acehan berdasarkan gagasan Hasan Muhammad Di Tiro.

Konsep Nasionalisme

Dalam perkembangannya, nasionalisme yang muncul secara tidak langsung mengilhami bentuk-bentuk ideologi sekaligus dijadikan sebagai falsafah kenegaraan. Sehingga cinta tanah air tidak hanya sebatas merebut dan mempertahankan kemerdekaan melainkan juga mempunyai banyak nilai – nilai luhur yang bernilai pendidikan. Dengan adanya akar nasionalisme sebagai rasa cinta tanah air, maka disitu pula akan tumbuh sikap patriotisme, rasa kebersamaan, kebebasan, kemanusiaan dan sebagainya. Karena nasionalisme dibangun oleh kesadaran sejarah, cinta tanah air, dan cita-cita politik. Nasionalisme menjadi faktor penentu yang mengikat semangat serta loyalitas untuk mewujudkan cita-cita setiap negara.

Pada mulanya unsur-unsur pokok nasionalisme itu terdiri atas persamaan-persamaan darah (keturunan), suku bangsa, daerah tempat tinggal, kepercayaan agama, bahasa dan kebudayaan. Nasionalisme akan muncul ketika suatu kelompok suku yang hidup di suatu wilayah tertentu dan masih bersifat primordial berhadapan dengan manusia-manusia yang berasal dari luar wilayah kehidupan mereka. Lambat laun ada unsur tambahan, yaitu dengan adanya persamaan hak bagi setiap orang untuk memegang peranan dalam kelompok atau masyarakat (demokrasi politik dan demokrasi sosial) serta adanya persamaan kepentingan ekonomi. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah nasionalisme modern.

Nasionalisme dapat mempengaruhi orang untuk bertindak lebih kuat dibandingkan aliran politik lainnya. semua ideologi dapat mempengaruhi perorangan secara emosional, dan masing-masing ideologi punya simbol kekuatan tertentu yang menghasilkan satu reaksi bagi mereka yang percaya. Tapi nasionalisme kadang kala juga menghasilkan reaksi pada mereka yang tidak percaya. Hal ini sangat mempengaruhi individu dan memerlukan penguatan reaksi lebih besar dibandingkan ideologi lain. Ideologi lain mungkin menjadi kaku dalam sebuah perspektif individu, sehingga mereka terlihat kurang mengambil sebuah tindakan (Lyman Tower S, 1987 : 17).

Maka nasionalisme merupakan ideologi paling kuat untuk membentuk sebuah gerakan reaktif atas aksi yang timbul dalam sebuah komunitas politik. Menurut Benedict Anderson nasionalisme adalah satu komunitas politik yang terbayangkan dan terbayangkan dimana secara inheren memiliki keterbatasan tetapi berdaulat yang memiliki legitimasi emosional. Sebab, meski pun sesama warga dari sebuah bangsa tidak saling mengenal, mereka memiliki tali ikatan persaudaraan dan persamaan (*the image of communion*). Ikatan persaudaraan horisontal menjadi satu dasar bagi anggota sebuah bangsa mengikatkan diri di dalam entitas satu bangsa (Anderson, 1991: 6-7).

Anderson menyebutkan bahwa budaya, agama, bahasa dan sejarah dinasti bisa menjadi dasar pembentukan bangsa atau masyarakat terbayang (*the imagined community*). Kolonialisme yang datang dengan budaya, bahasa dan agama berbeda dengan gampang dapat menyakinkan bangsa yang dijajah untuk menjadi satu entitas yang berbeda karena mereka memiliki akar budaya, kepercayaan, bahasa yang berbeda dari sosok penjajah mereka (Anderson, 1991 : 9).

Namun, berkaitan dengan faktor kesamaan ini, Laclau mensyaratkan satu elemen ‘positif’ semacam ini harus selalu disertai dengan identitas jenis apa yang mereka tolak – jika tidak maka kita akan menjalani resiko mengesensialkan identitas (*essentialising identity*). Karena itu, seluruh kesamaan yang dikatakan Anderson harus difahami bukan sebagai suatu asimilasi yang total. Identitas adalah suatu yang bergerak terus, dinamis, dan akan sangat bergantung konteksnya.

Pandangan Anderson ini sejalan dengan pemikiran Laclau and Mouffe tentang wacana. Sebab jika kemudian konsep nasionalisme ditempatkan sebagai wacana ideologi politik, sebagaimana Laclau and Mouffe (1990 : 30-36) katakan, wacana-wacana ini bersifat tidak tetap (atau bergantung kepada kondisi lain yang memeranguhinya) dan merupakan konstruksi kesejarahan, yang selalu rentan terhadap kekuatan-kekuatan politik yang dikeluarkan dari produksi mereka sebagaimana juga efek-efek ketercerabutan dari kejadian-kejadian yang berada di luar kontrol mereka. Dengan begitu, nasionalisme sebagai sebuah wacana bukan lah sesuatu yang tetap, tetapi akan terus mengalami perkembangan.

Menurut Nuri Soeseno sebagaimana dikutip Zulfiadi (2015:17) terdapat dua jenis nasionalisme berdasarkan identifikasi diri pada sub-bangsa dan negara-bangsa, yaitu *civic* dan *ethnic*. Nasionalisme atau rasa kebangsaan ini dibedakan menurut level kebangsaan: nasionalisme etnis (*Ethnic nationalism*), yaitu nasionalisme yang merupakan ikatan kebangsaan yang dibangun berdasarkan persamaan bahasa, kebudayaan, dan darah keturunan kelompok etnis tertentu. Sedangkan nasionalisme kewarganegaraan (*Civic nationalism*), merupakan kebangsaan yang dibangun lewat adanya pengakuan dan kesetiaan pada otoritas konstitusional dan kerangka perpolitikan dalam sebuah negara, selain sejarah yang sama sebagai negara-bangsa dan digunakannya bahasa yang sama oleh semua kelompok bangsa-bangsa. Atau dengan kata lain, ikatan yang dibangun nasionalisme ini didasarkan atas kewarganegaraan di dalam sebuah wilayah teritorial dan batas-batas yang berlaku bagi negara-bangsa. Keduanya sebagai dua kutub yang dinamis, dapat dikembangkan berdasarkan kepentingan pengikutnya. *Civic*, bersifat positif sebagai nasionalisme yang sudah melebur dalam sebuah *state* berupa Negara. Dalam *civic*, nilai nasionalisme telah mengkristal dan cenderung dianggap selesai tanpa masalah apapun. Sedangkan pada *ethnic*, nasionalisme belum selesai dan terus berusaha menemukan titik akhir pembentukannya. Namun hal ini bukan berarti bahwa *ethnic* tidak dapat menuju ke *civic*, karena ada nilai yang mungkin tidak diterima oleh kaum *ethnic*. Dalam *ethnic*, rasa saling kepercayaan dan rasa memiliki didasarkan pada ikatan etnis.

Civic nationalism atau nasionalisme kewarganegaraan adalah ketika sebuah pemerintahan berdiri bukan semata-mata pada basis kesamaan sejarah, etnisitas atau bahasa, tapi ide bahwa negara dan sekelompok masyarakat bersatu di bawah perangkat hak dan kewajiban yang disediakan pemerintah. Dalam kondisionalitas yang seperti itu, mustahil jika hukum dilandaskan pada etnisitas, karena perbedaan yang nyata antar kebudayaan dapat dengan mudah dilihat. Kemudian yang dapat dilakukan adalah menyusun perangkat kewarganegaraan dan norma yang berdasarkan identitas dan kesepakatan bersama. Sebuah faktor pemersatu (*unifying factor*) mau tidak mau harus diciptakan agar negara dapat bertahan dan tidak terpecah-belah. Sementara itu, *ethnic nationalism* atau nasionalisme etnis dapat kita temukan di negara-negara dimana terdapat latar belakang sejarah dan identitas yang hampir persis. Dalam kasus seperti ini, pembentukan negara terjadi secara ideal dan pemerintahannya dijalankan dengan cara yang demikian pula. Dengan adanya kesamaan norma atau etnisitas yang kuat, maka hukum yang mengatur tata negara juga dapat disesuaikan.

Dalam hal kekuatan sebagai ideologi konstruktif, nasionalisme kewarganegaraan dipercaya lebih realistis sebagai sumber kepemilikan daripada nasionalisme etnis. Etnisitas yang sama memang akan membuat sekelompok orang bersatu, tetapi menjadi lemah terhadap perbedaan-perbedaan kecil yang memungkinkan perpecahan yang lebih besar. Nasionalisme kewarganegaraan mengajukan kerangka berpikir dalam ruang rapat, partisipasi, serta

kemungkinan legislatif untuk menyatukan perpecahan. Dengan kata lain nasionalisme kewarganegaraan adalah nasionalisme di mana legitimasi politik negara berasal dari partisipasi aktif rakyatnya, yang merupakan "kehendak rakyat (*the will of the people*)".

Tabel Perbedaan Dasar *Ethnic Nationalism* dan *Civic Nationalism*

Nasionalisme Kewarganegaraan	Nasionalisme Etnis	Contoh
Hukum	Kesamaan asal (darah)	Kewarganegaraan
Pilihan	Warisan	"Dilahirkan dalam"
Ikatan rasional	Ikatan emosional	Pengadilan, bendera
Kesatuan berdasarkan konsensus	Kesatuan berdasarkan asumsi	<i>Town hall, tribe</i>
Pluralisme demokratis	Mayoritas etnis berkuasa	CA, Singapura
Kebebasan	Persaudaraan	ALCU, kampung halaman
Individu membentuk bangsa	Bangsa membentuk individu	Mitos pembentukan

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah analisis kepustakaan (*library research*). Analisis didasarkan pengumpulan data sekunder berbasis kepustakaan yang dihimpun dari berbagai literatur yang mendukung, baik jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, maupun reportase penelitian yang relevan. Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber bacaan kemudian diteliti dan dianalisis kesesuaiannya satu sama lain yang kemudian dirangkai dalam satu artikel yang utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Hasan Muhammad di Tiro tentang nasionalisme Aceh merupakan refleksi dari kekecewaannya terhadap Pemerintah Indonesia yang telah bertindak tidak adil kepada Aceh dalam pengelolaan hasil produksi sumber daya alam di Aceh. Hasil dari sumber daya alam di Aceh lebih banyak di lahap oleh para penentu kebijakan di Jakarta. Pada era Presiden Soeharto misalnya, Aceh hanya menerima 1 persen dari anggaran pendapatan nasional dengan kontribusi 14 persen dari GNP nasional (Harry Kaliwarang, 2010 : 158). Ketidakadilan pengelolaan sumber daya ini membuat Aceh tidak dapat berkembang di bandingkan dengan daerah lain di Indonesia seperti daerah-daerah di pulau Jawa yang tidak memiliki sumber daya alam sebesar yang dimiliki oleh Aceh.

Kekecewaan Hasan Muhammad di Tiro kemudian memunculkan wacana dengan menumbuhkan kembali rasa cinta keAcehan atau nasionalisme Aceh. Dengan menumbuhkan kembali nasionalisme Aceh menurut Hasan Tiro akan membuka pikiran rakyat Aceh untuk sadar bahwa harkat dan martabat Aceh sebagai bangsa besar dan wilayah yang sangat berjasa bagi Indonesia telah di lecehkan. Tumbuhnya nasionalisme Aceh ini menjadi modal baginya untuk berjuang memerdekakan Aceh dari Indonesia. Nasionalisme Aceh bagi Hasan Tiro merupakan sebuah keharusan yang wajib diperjuangkan oleh masyarakat Aceh. Nasionalisme

Aceh menurut Hasan Tiro adalah tercapainya kemerdekaan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi rakyat Aceh.

Pemikiran nasionalisme Aceh Hasan Muhammad di Tiro sangat di pengaruhi oleh sejarah kejayaan kerajaan Aceh pada masa lalu. Dengan pengetahuannya terhadap sejarah Aceh dan hukum internasional, Hasan Muhammad di Tiro berusaha membangkitkan kembali kesadaran masyarakat bahwa Aceh dalam sejarah adalah sebuah negara berdaulat jauh sebelum Indonesia ada. Kekuasaan Aceh meliputi hampir seluruh Sumatera dan negara Malaysia sekarang ini. Kekuasaan ini bahkan menyebar sampai ke sebagian Kalimantan. Kekuasaan yang demikian besar sungguh tidak layak menjadi hanya sebagai sebuah daerah dalam negeri lain. Aceh seharusnya adalah sebuah negara dan daerah-daerah lain adalah sebuah daerah taklukan yang sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Aceh. Hasan Muhammad di Tiro mengatakan, sungguh sangat hina jika saat ini Aceh diletakkan sebagai sebuah provinsi di bawah Indonesia yang baru lahir. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhrizal Hamzah (2014:466) dalam bukunya *Hasan Tiro : Jalan Panjang Menuju Damai Aceh*, bahwa dalam gagasan Hasan Tiro, Aceh Merdeka bukanlah suatu negara baru. Justru bagi Hasan Tiro, Aceh Merdeka merupakan negara yang dihidupkan kembali setelah pernah berkuasa ratusan tahun jauh sebelum Indonesia merdeka. Karena bagi Hasan Tiro teritorial Aceh tidak pernah masuk dalam wilayah Hindia-Belanda terutama mengacu Peta Royaume Dacheh (*Kingdom of Aceh*) yang dibuat oleh Perancis tahun 1873. Dasar lain yang digunakan ialah Peta Graphic (22 September 1883) buatan Inggris yang menunjukkan Aceh sebagai negara dan memiliki wilayah hukum teritorial. Tidak pernah ada negoisasi yang mengiring Aceh menjadi bagian dari Indonesia. Sebaliknya, Indonesia mengklaim Aceh masuk dalam kolonial Belanda berdasarkan peta buatan *National Geographic Society* yang menunjukkan batas Indonesia menjadi pengakuan PBB pasca Perang Dunia II yakni batas wilayah tahun 1939. Lebih lanjut Ahmad Taufan Damanik (2010 : 47) dalam bukunya *Hasan Tiro, Dari Imajinasi Negara Islam ke Imajinasi Etno-Nasionalis* mengemukakan bahwa pemikiran Nasionalisme Aceh Hasan Tiro tidak sesuai dengan teori Benedict Anderson tentang *Imagined Communities*. Pemikiran Nasionalisme Aceh Hasan Tiro merupakan negara sambungan dari Kerajaan Aceh pada masa dahulu. Ahmad Damanik menjelaskan bahwa Aceh sebagai *succesor state* bukanlah *imagined communities* seperti yang dikemukakan oleh Anderson. Karena Aceh sudah pernah ada sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat serta diakui dunia sejak ratusan tahun yang lalu.

Nasionalisme Aceh adalah penerapan dan pengakuan terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Aceh. Kultur budaya yang cenderung sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai keislaman harus pula diperhatikan. Keinginan Hasan Tiro adalah bagaimana Aceh menjadi sebuah wilayah yang merdeka, yang memiliki kekuasaan penuh terhadap penerapan nilai-nilai kearifan lokal dan Syariat Islam. Disamping itu Hasan Tiro juga berkeinginan agar Aceh memiliki kekuasaan penuh untuk mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat Aceh. Pengelolaan sumber daya alam atas nama bangsa Aceh, bukan bangsa ataupun suku lain dengan alasan persatuan dan kesatuan.

Nasionalisme Aceh menurut pemikiran Hasan Tiro tersebut kemudian diimplementasikannya dalam sebuah gerakan untuk mencapai kemerdekaan rakyat Aceh atau yang lebih kita kenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka. Perjuangan mengenai nasionalisme Aceh berdasarkan buah pikiran dari Hasan Tiro memberikan semangat tersendiri bagi Gerakan Aceh Merdeka untuk menentang dan melawan pemerintah Indonesia guna mencapai kemerdekaan. Dalam pemikirannya, Hasan Tiro sangat menginginkan adanya persatuan dari masyarakat Aceh sebagai sebuah bangsa. Karena Hasan Tiro menyadari bahwa perjuangan untuk mencapai kemerdekaan tidak bisa dilakukan apabila seluruh masyarakat Aceh tidak bersatu dalam sebuah organisasi gerakan. Perjuangan Hasan Tiro dalam menyatukan Aceh didalam sebuah organisasi mulai membuahkan hasil, masyarakat Aceh mulai menyadari dan mengakui Gerakan Aceh Merdeka sebagai sebuah sarana dalam menerapkan dan memunculkan nasionalisme tersebut.

Kesadaran masyarakat Aceh tentang nasionalisme ke-Acehaan ini turut memberikan pengaruh besar dan signifikan dalam Gerakan Aceh Merdeka. GAM kemudian menjadi sebuah simbol dan gerakan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Aceh, tidak perlu waktu lama bagi GAM untuk mengumpulkan masyarakat Aceh dalam satu Organisasi. GAM membawa isu utama mengenai ketimpangan sosial yang dialami masyarakat Aceh, ketimpangan sosial tersebut kemudian semakin memuncak pada masa presiden Soeharto, dimana Aceh hanya menerima 1 persen dari anggaran pendapatan nasional dengan kontribusi sebesar 14 persen yang diberikan Aceh untuk Indonesia. Ketimpangan inilah yang kemudian memberikan persatuan dan memunculkan nasionalisme Aceh dan keinginan yang sangat kuat dari masyarakat Aceh untuk merdeka dari Indonesia, dan semua keinginan tersebut dipelopori oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Pada awal berdirinya Gerakan Aceh Merdeka tanggal 4 Desember 1976, Hasan Tiro hanya memiliki 150 pengikut yang berjuang bersama, dan dalam tempo 2 tahun, tepatnya tahun 1978 Hasan Tiro telah memiliki kurang lebih 5000 pengikut yang aktif dalam keanggotaan GAM untuk menentang Indonesia. Pada umumnya, pendukung dan pengikut Hasan Tiro merupakan mantan anggota DI/TII pimpinan Daud Beureueh. Keikutsertaan mantan anggota DI/TII seperti Tengku Ilyas Leube, Tengku Idris Ahmad, Tengku Hasbi dan lain-lain merupakan seruan yang disampaikan oleh Tengku Daud Beureueh. Bukan hanya menyerukan para pengikutnya untuk terlibat dalam GAM, tetapi Tengku Daud Beureueh juga ikut mengumpulkan dana dari pedagang-pedagang Aceh kemudian mengirim ke markas komando di wilayah berdaulat di rimba Aceh (Husaini M Hasan, 2015 : 90). Perjuangan yang dilakukan Hasan Tiro ini tidak hanya menginginkan Aceh sebagai negara Islam, tetapi negara yang murni lepas dari kesatuan Negara Indonesia.

Dalam perjuangan mencapai nasionalisme Aceh, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sangat menyadari bahwa tak ada gunanya untuk melakukan perundingan dengan Jakarta, karena GAM menganggap bahwa sampai kapanpun Jakarta hanya ingin mengeruk dan menguasai sumber daya alam Aceh. Bahkan dalam beberapa lelucon, semua harus menunggu Jakarta dalam hal apapun, bahkan untuk sekedar membeli buku tulis.

Selain isu mengenai ketimpangan sosial, penguasaan sumber daya alam oleh Jakarta, Gerakan Aceh Merdeka juga menjadikan suku mayoritas di Indonesia, dalam hal ini suku Jawa sebagai musuh utama dalam historis masyarakat Aceh. Walaupun bagi sebagian kalangan masyarakat Indonesia, pemikiran tersebut dianggap sudah tidak relevan lagi karena konsep Indonesia sebagai sebuah bangsa sudah final setelah proklamasi Indonesia, namun Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sangat tidak sepakat dan setuju dengan konsep tersebut. GAM kembali mengungkit soal Kesultanan Aceh yang sama sekali terpisah dari Indonesia, pada sejarahnya Kesultanan Aceh merupakan wilayah yang tidak tersentuh oleh kolonialisme Belanda karena selalu ada peperangan. Menurut Pandangan GAM, masyarakat Aceh tidak pernah disosialisasikan untuk menjadi bagian dari negara Indonesia. Jakarta telah menjarah kekayaan dan membiarkan masyarakat Aceh menderita oleh perlakuan diskriminasi. Itulah yang diperjuangkan GAM untuk mencapai nasionalisme Aceh.

Perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk mencapai nasionalisme Aceh dilakukan dengan berbagai cara dan tindakan. GAM kemudian mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara federal yang memiliki struktur kepemimpinan dibawah Hasan Tiro sebagai Wali Negara. GAM juga membentuk sayap militer yang diberi nama Tentara Rakyat Aceh (TRA) yang anggota-anggotanya dikirim ke Libya untuk belajar mengenai taktik berperang. GAM juga meminta bantuan baik secara sukarela maupun paksaan terhadap masyarakat Aceh untuk membantu perjuangan mencapai nasionalisme Aceh. Tindakan GAM yang sangat berani adalah ketika melakukan serangan terhadap perusahaan minyak asing, EXXON mobil untuk memberikan “upeti” dalam perjuangan tersebut, bahkan EXXON mobil sempat menutup dan

menghentikan kegiatan operasional perusahaan karena adanya situasi diluar kendali di wilayah tersebut.

Perjuangan GAM dalam upaya mencapai nasionalisme Aceh turut juga memberikan pengaruh pada anak-anak muda, terutama pada mahasiswa yang membentuk sebuah gerakan untuk memberikan referendum bagi masyarakat Aceh. Gerakan tersebut dikomandani oleh Muhammad Nazar yang membentuk Sentra Reformasi Referendum Aceh (SIRA) tahun 1999. Keinginan untuk mendapatkan hak untuk melakukan referendum bagi masyarakat Aceh dilatarbelakangi oleh kejadian dan peristiwa yang dialami oleh Timor-Timur ketika melepaskan diri bagi Indonesia. SIRA mengadopsi hal tersebut dan berupaya untuk diterapkan pula di Aceh.

Pasca bencana tsunami di Aceh, menjadi tonggak baru dalam perjuangan GAM mencapai nasionalisme Aceh. GAM menyadari bahwa bencana tersebut memberikan dampak yang sangat besar terhadap masyarakat Aceh maupun GAM sendiri. Bencana tersebut membuat GAM sedikit mengendur dan melemah dalam perjuangan mencapai nasionalisme Aceh, bagi GAM terdapat masalah utama dari sekedar mencapai kemerdekaan, yaitu masalah kemanusiaan yang dialami oleh masyarakat Aceh. Bencana tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Pemerintah Indonesia yang langsung mengajak GAM untuk berunding dan mengambil tindakan-tindakan dalam upaya membantu penyelesaian bencana tersebut baik itu dilakukan oleh pemerintah Indonesia maupun dunia internasional.

Perundingan antara Pemerintah Indonesia dan GAM akhirnya mencapai kesepakatan, yang dikenal dengan Perjanjian Helsinki. Kesepakatan kedua belah pihak tersebut diantaranya memberikan hak bagi masyarakat Aceh untuk memiliki hukum sendiri yang berdasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang ada, memberikan hak bagi masyarakat Aceh untuk memiliki partai lokal sendiri, memberikan hak bagi masyarakat Aceh untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki dengan ketentuan-ketentuan tertentu, serta memberikan hak bagi masyarakat Aceh untuk memiliki simbol-simbol kebudayaan masa lalu berdasarkan sejarah Kesultanan Aceh. Selain itu juga, masyarakat Aceh dalam hal ini para anggota GAM memiliki kewajiban untuk menyerahkan senjata-senjata yang dimiliki, memiliki kewajiban menjadi masyarakat sipil biasa, dan yang utama adalah Aceh tetap menjadi bagian dari Indonesia. Perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut kemudian diimplementasikan dalam sebuah komite yang dinamai Komite Peralihan Aceh (KPA) yang diisi oleh mantan kombatan GAM untuk mengawasi proses re-integrasi perdamaian yang telah disepakati.

Kondisi Aceh masa kini jika dihubungkan dengan pemikiran Nasionalisme Aceh Hasan Muhammad di Tiro sangatlah bertolak belakang. Hasan Muhammad di Tiro pada dasarnya menginginkan Aceh menjadi sebuah negara merdeka yang mempunyai kedaulatan dalam mengelola kehidupan, kebudayaan, dan sumber daya alam sendiri, bukan menjadi bagian dari suatu negara atau menjadi provinsi suatu negara yang diberikan otonomi khusus seperti saat ini. Ketidaksesuaian arah perjuangan ini dapat disebabkan bahwa generasi penerus Hasan Tiro tidak ada yang memiliki landasan ideologi yang kuat seperti Hasan Muhammad di Tiro dan juga dapat disebabkan dengan perubahan arah perjuangan dari perjuangan melalui senjata menjadi perjuangan melalui politik dan diplomasi. Aceh masa kini memang tidak bisa mewujudkan secara langsung pemikiran Nasionalisme Aceh Hasan Muhammad di Tiro yaitu menjadi negara merdeka. Akan tetapi secara tidak langsung rasa nasionalisme Aceh itu telah tumbuh dan terus bertahan dalam jiwa rakyat Aceh dengan menjaga perdamaian serta meimplementasikan butir-butir perjanjian Helsinki demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat Aceh seperti yang di cita-citakan oleh Tengku Hasan Muhammad di Tiro.

Implementasi dari perjanjian Helsinki tersebut memberikan wajah baru dalam perpolitikan lokal di Aceh, secara sadar ataupun tidak, perjuangan masyarakat Aceh yang dinakhodai oleh GAM tidak lagi berada ditataran jalanan, tidak lagi mengandalkan tentara, militer, kombatan dan bentuk-bentuk perang gerilya lainnya, tetapi perjuangan masyarakat Aceh telah berada di level yang lebih tinggi yaitu politik. Ini merupakan kemenangan besar bagi

masyarakat Aceh dalam mewujudkan nasionalisme Aceh. Walaupun salah satu butir dalam perjanjian Helsinki menyatakan bahwa Aceh tetap menjadi bagian Indonesia, tetapi Aceh memiliki hak-hak politik yang berdasarkan kebudayaan lokal seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Keberadaan hukum sendiri, partai sendiri, dan bentuk-bentuk lainnya berdasarkan budaya lokal Aceh, bisa dikatakan pula bahwa Aceh merupakan sebuah negara didalam negara Indonesia.

SIMPULAN

Pemikiran Nasionalisme Aceh Hasan Muhammad di Tiro merupakan refleksi sebuah kekecewaan terhadap sikap ketidakadilan Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam Aceh. Pemikiran Nasionalisme Aceh ini sangat di pengaruhi oleh sejarah kejayaan kerajaan Aceh pada masa lalu yang kemudian menumbuhkan kesadaran Hasan Muhammad di Tiro untuk berjuang membentuk Negara Aceh-Sumatera Merdeka. Kemudian perjuangan Negara Aceh-Sumatera Merdeka dilakukan melalui pembentukan Gerakan Aceh Merdeka yang kemudian membentuk Tentara Rakyat Aceh untuk melakukan berperangan melawan Negara Indonesia yang berlangsung selama 32 tahun. Perperangan selama 32 tahun diakhiri dengan perjanjian Damai antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Negara Republik Indonesia pada 15 Agustus 2005 yang sekaligus menghilangkan perjuangan Hasan Muhammad di Tiro untuk kemerdekaan Aceh.

Seiring berjalannya waktu, pemikiran nasionalisme Aceh yang dicetuskan oleh Hasan Tiro melalui berbagai macam gerakan dan tindakan telah pula membuahkan hasil bagi Aceh masa kini. Terlepas dari keinginan Hasan Tiro yang ingin Aceh menjadi sebuah negara sendiri dan belum terwujud, namun nasionalisme Aceh yang dicetuskan oleh Hasan Tiro tersebut tetap menggema dan telah diimplementasikan oleh Aceh masa kini dalam bentuk hukum, tindakan, dan peraturan berdasarkan nilai-nilai budaya lokal yang dimiliki oleh Aceh.

REFERENSI

- Anderson, BROG. 1991. *Imagined Communities, Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.
- Ahmad Taufan Damanik. 2010. *Hasan Tiro, Dari Imajinasi Negara Islam ke Imajinasi Etno-Nasionalis*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES) dan Aceh Future Institute (AFI).
- Harry Kawilarang. 2010. *Aceh Dari Sultan Iskandar Muda Ke Helsinki*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Husaini Hasan. 2015. *Dari Rimba Aceh Ke Stockholm*. Jakarta : Batavia Publishing.
- Isa Sulaiman. 2000. *Aceh Merdeka; Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Laclau E. 1990. *New Reflections on the Revolution of Our Time*. London: Verso.
- Muhrizal Hamzah. 2014. *Hasan Tiro : Jalan Panjang Menuju Damai Aceh*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Munawar A Djalil. 2009. *Hasan Tiro Berontak; Antara Alasan Historis, Yuridis dan Realitas Sosial*. Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher.
- Tower Sergeant, Lyman. 1987. *Contemporary Political Ideologies, Seventh Edition*. California: Brooks/Cole Publishing Company.
- Zulfiadi. 2015. *Negosiasi Ethnik Nasionalisme Versus Civic Nasionalisme (Studi Tentang Dialektika Identitas Keacehan Vs Keindonesiaan)*. Tesis. Universitas Gadjah Mada.